

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong merupakan hasil reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, serta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, mulai beroperasi tanggal 14 Agustus 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong berlokasi di Jalan Aman No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor. Luas tanah 2.965 M2 dan luas bangunan 1456 M2 yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

B. Deskripsi Responden

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut pertama adalah variabel independen atau variabel bebas (variabel X), yaitu Modernisasi Administrasi pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat (variabel Y), yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dengan menyebar kuesioner atau angket kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cibinong. Kuesioner disebar kepada warga Cibinong dengan kriteria minimal lulusan SMK, sudah bekerja dan mempunyai NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cibinong. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas tersebut peneliti kemudian mendapatkan responden sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cibinong dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Kusioner Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	56	100
	Perempuan	44	
Pendidikan Terakhir	SMA/K	39	100
	Sarjana	61	
	Diploma	0	
Pekerjaan	Pegawai Swasta	91	100
	Pegawai Negri Sipil	7	
	Wirausaha	2	

C. Hasil Uji Analisis Data Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variable independen (Modernisasi Administrasi pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak) terhadap variable dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variable dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak serta variable independen (X) yaitu modernisasi administrasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Hasil pengujian variable-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Dekskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Administrasi Pajak	100	13	20	16,81	2,308
Kesadaran Perpajakan	100	11	20	16,08	2,699
Sanksi Perpajakan	100	10	20	15,27	2,950
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	20	17,18	1,877
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 25

Tujuan dilakukannya uji statistik deskriptif adalah untuk melihat karakteristik data. Apabila nilai dari mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka kualitas data tersebut lebih baik. Standar deviasi adalah besaran besar perbedaan dari nilai sampel dengan nilai rata-rata. Standar deviasi digunakan untuk melihat sebaran data dalam sampel. Semakin rendah standar deviasinya maka semakin dekat dengan rata-rata dan sebaliknya semakin tinggi standar deviasi maka semakin besar keragaman sampel. Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel

Selain itu terdapat data mengenai nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci per variabel.

- a) Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Modernisasi Administrasi Pajak.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen Modernisasi Administrasi Pajak (X1) menunjukkan nilai minimum 13 dan nilai maksimum 20 dengan nilai rata-rata (mean) 16,81 dan standar deviasi 2,308. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden mengenai modernisasi administrasi pajak termasuk tinggi karena nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.

- b) Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Pajak

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen Kesadaran Pajak (X2) menunjukkan nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20 dengan rata-rata (mean) 16,08 dan standar deviasi 2,699. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden mengenai Kesadaran Pajak termasuk tinggi karena nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.

- c) Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen Sanksi Pajak (X3) menunjukkan nilai minimum 10 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 15,27 dan nilai standar deviasi sebesar 2,950. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden mengenai Sanksi Pajak termasuk sedang karena nilai rata-rata berada diantara nilai minimum dan nilai maksimum.

d) Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dependen Kepatuhan Pajak (Y) menunjukkan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 20 dengan rata-rata (mean) 17,18 dan standar deviasi 1,877. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden mengenai kepatuhan pajak termasuk tinggi karena nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi produk moment, kriteria yang digunakan dalam menentukan valid atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a, n-2) dari tabel produk moment $\alpha = 5\%$ dan $n = 100$
- Jumlah responden sebanyak 100 responden untuk di uji
- r hitung (tabel corrected item total correlation) $>$ r tabel (tabel product moment) atau bernilai positif maka data dikatakan valid.

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji validitas dari modernisasi system kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Cibinong dengan sampel 100 responden.

- Variabel Modernisasi Administrasi pajak

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Modernisasi Administrasi pajak

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X1.1	0,808	0,197	Valid
X1.2	0,772	0,197	Valid
X1.3	0,765	0,197	Valid
X1.4	0,827	0,197	Valid
X1.5	0,648	0,197	Valid

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel modernisasi system administrasi pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r table sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan

dalam penelitian ini valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kusioner.

b) Variabel Kesadaran Perpajakan

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X2.1	0,765	0,197	Valid
X2.2	0,732	0,197	Valid
X2.3	0,820	0,197	Valid
X2.4	0,839	0,197	Valid
X2.5	0,788	0,197	Valid

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel modernisasi system administrasi pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r table sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kusioner.

c) Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X3.1	0,832	0,197	Valid
X3.2	0,872	0,197	Valid
X3.3	0,797	0,197	Valid
X3.4	0,721	0,197	Valid
X3.5	0,805	0,197	Valid

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel modernisasi system administrasi pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r table sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kusioner.

d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Y.1	0,711	0,197	Valid
Y.2	0,747	0,197	Valid
Y.3	0,867	0,197	Valid
Y.4	0,800	0,197	Valid
Y.5	0,684	0,197	Valid

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel modernisasi system administrasi pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r table sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kusioner.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kusioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kusioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau validitas dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Nunaly, 1994 dalam Ghozali, 2011:48). Perhitungan koefisien Cronbach's Alpha dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 25.

a) Variabel Modernisasi Administrasi pajak

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Administrasi pajak

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Modernisasi Administrasi pajak	0,822	5	Reliabel

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.7 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,822. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

b) Variabel Kesadaran Perpajakan

Tabel 4.8

Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Perpajakan

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,847	5	Reliabel

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,847. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

c) Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 4.9

Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Sanksi Perpajakan	0,864	5	Reliabel

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.9 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Sanksi perpajakan sebesar 0,864. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,820	5	Reliabel

Sumber : data diolah dari (SPSS 25)

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,820. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

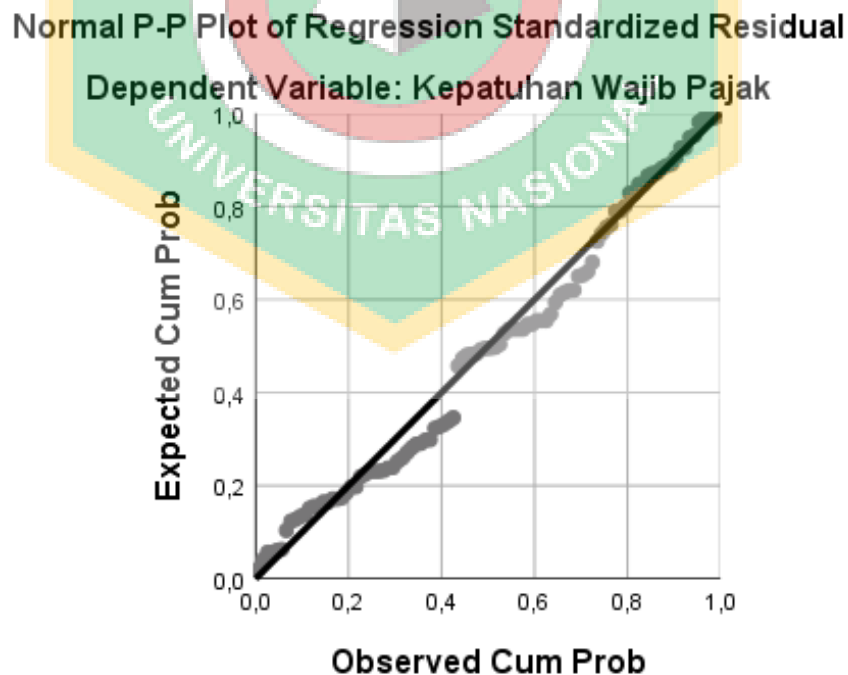
4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis ordinal least square (OLS). Yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel campuran atau residual model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Jika normal, residual terdistribusi secara normal dan independen. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik normal plot dan metode *uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dasar pengambilan keputusan pada grafik normal plot dapat dilihat dari titik penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik. Jika varian berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar secara diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal plot.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Plot)



Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tampilan grafik normality probability plot pada gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik yang menggambarkan jumlah sampel pada penelitian ini terletak atau menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti garis diagonal dengan arah yang sama, sehingga model data regresi memenuhi persyaratan asumsi normalitas data dan pola distribusinya konsisten dengan diagram probabilitas normalitas.

Metode uji *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)* juga digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan data berdistribusi normal. Uji *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menguji nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas kurang dari 0,05, variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya jika angka probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti data berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji K-S ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Nonparametrik Test One Sample Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,58587547
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,087
	Negative	-0,050
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,062 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,062 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Menurut perkiraan dasar uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, ketika Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi 0,05 atau 5%, maka model regresi ini berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Dengan melihat nilai *tolerance* :

- a. Apabila nilai tolerance > dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas
- b. Apabila nilai tolerancenya < dari 0,10 maka terjadi multikolinieritas

Dengan melihat nilai VIF :

- a. Jika nilai VIF > 10, maka hal tersebut akan terjadinya multikolinieritas
- b. Sedangkan apabila nilai VIF < 10, maka hal tersebut tidak akan terjadi multikolinieritas

Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.12

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Modernisasi Administrasi Pajak	0,669	1,494
	Kesadaran Perpajakan	0,499	2,006
	Sanksi Perpajakan	0,563	1,777

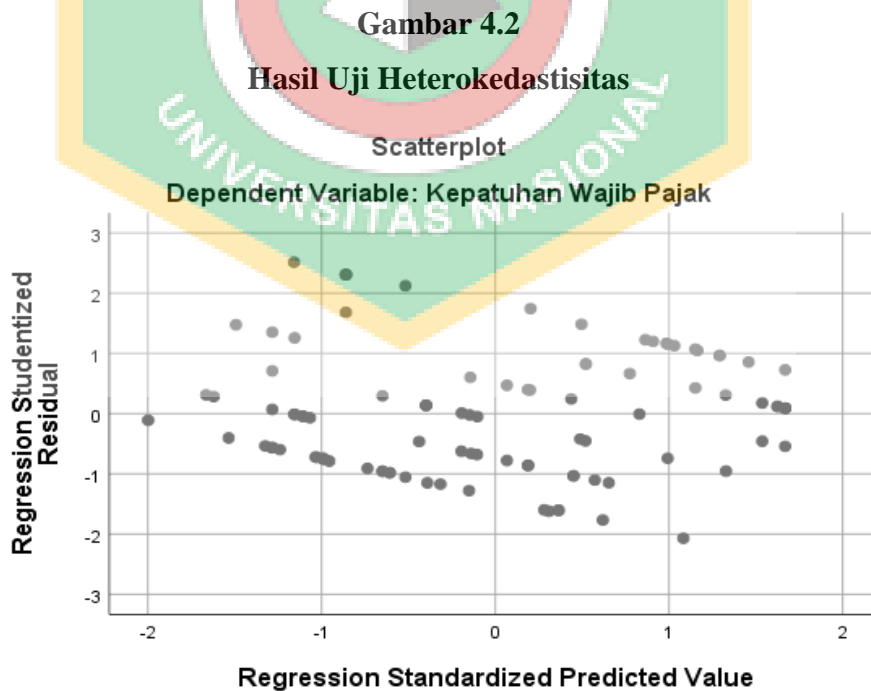
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) semua variabel berada dikisaran 1 hingga 10 yaitu variabel Modernisasi Administrasi Pajak sebesar 1,494, variabel Kesadaran Perpajakan sebesar 2,006, variabel Sanksi Perpajakan sebesar 1,777. Selain itu, nilai Tolerance setiap variabel kurang dari 1 yaitu variabel Modernisasi Administrasi Pajak sebesar 0,669, variabel Kesadaran Perpajakan sebesar 0,499, variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,563. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeksi hal apakah terdapat atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan uji grafik plot. Apabila tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heterokedastisitas. Pada gambar 4.13 di bawah ini merupakan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplots:



Sumber : Output SPSS 25

Grafik scatterplots di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan variabel yang mempengaruhinya (independent) yaitu Modernisasi Administrasi Pajak (X1), Kesadaran Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3).

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Kondisi ini sering ditemukan pada waktu (time series) karena adanya “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada penelitian ini menggunakan durbin-watson untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi atau tidak. Penelitian ini menggunakan nilai DW untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, jika nilai DW lebih besar dari batas atas (dl) dan kurang kurang dari 4-(du) maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Berikut adalah hasil autokorelasi pada penelitian ini :

Tabel 4.13

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,535 ^a	0,286	0,264	1,610	1,779
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 4.14 Di atas menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,779. dengan jumlah predictors sebanyak 3 buah (k=3) dan sampel sebanyak 100 data kusioner (n=100), berdasarkan tabel D-W dengan tingkat signifikansi 5%, maka

dapat ditentukan nilai (du) adalah 1.7364 dan (4-du) adalah sebesar 2.2636 dengan demikian nilai $du < DW < 4-du$ yaitu $1.7364 < 1,779 < 2.2636$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam model regresi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bebas dari adanya autokorelasi.

5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel independent (Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak).

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,545	1,255		7,607	0,000
	Modernisasi Administrasi Pajak	0,254	0,086	0,312	2,961	0,004
	Kesadaran Perpajakan	0,167	0,085	0,241	1,971	0,052
	Sanksi Perpajakan	0,044	0,073	0,070	0,605	0,547

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 9,545. Nilai koefisien variabel Modernisasi Administrasi Pajak sebesar 0,254, nilai koefisien variabel Kesadaran Perpajakan sebesar 0,167 dan nilai koefisien Sanksi Perpajakan yaitu sebesar 0,044. Hasil yang diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 9,545 + 0,254MAP + 0,167KP + 0,044SP + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
A	= Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
X1	= Modernisasi Administrasi Pajak (MAP)
X2	= Kesadaran Perpajakan (KP)
X3	= Sanksi Perpajakan (SP)
E	= Error

Dari persamaan regresi diatas, dapat diuraikan bahwa masing – masing variabel sebagai berikut :

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan diatas dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib akan bernilai 9,545 apabila variabel modernisasi administrasi pajak, variabel kesadaran perpajakan dan variabel sanksi perpajakan dianggap konstan atau bernilai 0 (nol). Maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 9,545.

b. Modernisasi Administrasi Pajak

Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Pajak menunjukkan nilai 0,254. Jika profitabilitas meningkat 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,254 poin dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dianggap konstan atau bernilai 0 (nol)

c. Kesadaran Perpajakan

Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan menunjukkan nilai 0,167. Jika Kesadaran Perpajakan meningkat 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,167 poin dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dianggap konstan atau bernilai 0 (nol)

d. Sanksi Perpajakan

Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai 0,044. Jika Sanksi Perpajakan meningkat 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,044 poin dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya dianggap konstan atau bernilai 0 (nol).

6. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun hasil uji koefisien adjusted R square disajikan dalam tabel 4.16 di bawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,535 ^a	0,286	0,264	1,610
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,286 dan nilai determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa 26,4% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak bisa dijelaskan dengan variabel independent (Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan) sedangkan sisanya 73,6% dapat dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikan Simultan (uji f)

Tujuan dilakukannya uji statistik F adalah untuk mengukur apakah semua variabel independen yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependem. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99,775	3	33,258	12,823	,000 ^b
	Residual	248,985	96	2,594		
	Total	348,760	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan						

Sumber : Output SPSS 25

Hasil uji statistik F berdasarkan tabel 4.17 diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 12,823 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Menurut V.Wiratna Sujarweni (2014, 154), jika nilai f hitung > f tabel, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 112 variabel dependen. Nilai f tabel pada penelitian ini yaitu, $f \text{ tabel} = (k; nk) = (3; 100-3) = (3; 97) = 2,698$ Karena nilai F diatas 2,698 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), atau nilai F ($12,823 > 2,698$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$) maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga variabel Modernisasi Administrasi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Parameter Individual (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan tingkat signifikansi yang digunakan untuk dasar menilai seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%, sehingga tingkat ketidak akuratan sebesar 5% atau 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji t :

Tabel 4.17
Hasil Uji t (t-Test)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,545	1,255		7,607	0,000
	Modernisasi Administrasi Pajak	0,254	0,086	0,312	2,961	0,004
	Kesadaran Perpajakan	0,167	0,085	0,241	1,971	0,052
	Sanksi Perpajakan	0,044	0,073	0,070	0,605	0,547

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak H1 (Ghozali, 2018). Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa hanya satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variable Modernisasi Administrasi Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel yang kurang dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah interpretasi dari hasil uji hipotesis dengan uji parsial atau uji t adalah sebagai berikut.

(a) Pengaruh variabel Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.18 nilai t hitung untuk modernisasi system administrasi perpajakan sebesar 2,961 lebih besar dari t tabel = $t(\alpha/2; n-k-1 = (0,025; 96) = 1,985$ dan nilai signifikan sebesar 0,004. Hasilnya t hitung $>$ t tabel ($2,961 > 1,985$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong atau secara statistik apabila Modernisasi Administrasi Pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin terwujud.

(b) Pengaruh variabel Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.18 nilai t hitung untuk Kesadaran Perpajakan sebesar 1,971 lebih kecil dari t tabel = $t(\alpha/2; n-k-1 = (0,025; 96) = 1,985$ dan nilai signifikan sebesar 0,052. Hasilnya $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($1,971 < 1,985$) dan signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,052 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong atau secara statistik apabila kesadaran perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak akan semakin sulit terwujud.

(c) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.18 nilai t hitung untuk Sanksi Perpajakan sebesar 0,605 lebih kecil dari t tabel = $t(\alpha/2; n-k-1 = (0,025; 96) = 1,985$ dan nilai signifikan sebesar 0,547. Hasilnya $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,605 < 1,985$) dan signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,547 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong atau secara statistik apabila Sanksi Perpajakan mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terwujud.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis (H1) melalui analisis statistic menunjukan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dengan nilai t hitung lebih besar dari t table sebesar $2,961 > 1,985$. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat membuktikan bahwa variable Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Sarunan, 2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat

Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filing. Dengan adanya e-filing tersebut maka tentunya proses pemenuhan kewajiban yang akan dilakukan oleh para wajib pajak akan menjadi lebih mudah dan sistematis, dan tentunya hal yang paling menguntungkan bagi para wajib pajak ialah mereka dapat memenuhi kewajiban mereka kapan saja dan dimana saja (efisien). E-filing merupakan salah satu contoh ataupun bentuk dari adanya modernisasi administrasi perpajakan, tentunya masih terdapat bentuk layanan lainnya. Melalui modernisasi administrasi perpajakan ini secara logika akan mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak (semakin patuh), karena sistem administrasi pajak yang tradisional dan terkesan lamban-lah yang selama ini menjadi salah satu alasan utama yang membuat wajib pajak malas/enggan untuk memenuhi setiap kewajibannya (patuh) sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnan, 2019) yang menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi dimana keefektifitasan sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wella Dwi Rosana, 2020) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis (H2) melalui analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,052 > 0,05$ dengan nilai t hitung lebih kecil dari t table sebesar $1,971 < 1,985$. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka dapat membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh karena pada umumnya masyarakat dan khususnya tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang sehingga

mengakibatkan kesadaran tentang manfaat yang diperoleh wajib pajak masih kurang, pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Pajak dianggap banyak memberatkan karena dari wajib pajak masih memiliki pemikiran bahwa pemungutan pajak terjadi banyak penyelewengan dan kurangnya pemahaman akan hasil pajak tersebut digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amanda, Rifa, & Minovia (2013) yang menunjukkan secara keseluruhan bahwa pengaruh kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis kedua (H2) terbukti ditolak dimana tidak didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesis nol gagal ditolak atau terbukti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis (H3) melalui analisis statistik menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,547 > 0,05$ dengan nilai t hitung lebih kecil dari t table sebesar $0,605 < 1,985$. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka dapat membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif karena bagi wajib pajak yang mampu dalam membayar pajak tetapi mereka seandainya saja akan menganggap remeh denda baik administrasi yang akan diberikan, dan kurang tegasnya dalam memberikan denda dapat membuat wajib pajak kurang tanggap atau meremehkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh dalam membayar pajak.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis ketiga terbukti dimana tidak didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa

hipotesa nol gagal ditolak atau terbukti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Rorong et al., 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah.

